

Dampak kebijakan pendidikan gratis bagi kualitas pendidikan di Pesantren Fath

Dia Hidayati Usman^{1*}, Sofyan Sauri² & Amir Faishol Fath¹

¹STIU Dirasat Islamiyah al-Hikmah Jakarta

²Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

*diahidayatiusman75@gmail.com

Abstract

This study aimed to describe the impact of free education on the quality of education at the Fath Islamic Boarding School. Many assume that free schools are synonymous with low quality, even though many institutions have a free-fee policy and can produce good-quality students. This study took a sample from the Fath Sukawangi Islamic boarding school, Bogor, which adopted a policy of free education for students in it. The method used in this research is interviews and data collection, as well as a literature review in the form of research journals, documents, literature books, and scientific articles related to the central theme of discussion. The method used in this research is interactive analysis, namely data reduction, data display, and data verification. The results of this study show that a free policy in an educational institution will have a good impact when balanced with neat and professional governance.

Keywords: education policy; free education; quality of education

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan dampak pendidikan gratis pada kualitas pendidikan di Pesantren Fath. Banyak anggapan bahwa sekolah gratis identik dengan kualitas yang rendah, padahal banyak juga Lembaga yang mempunyai kebijakan biaya gratis dan bisa melahirkan peserta didik yang baik dan berkualitas. Penelitian ini mengambil sampel pesantren Fath Sukawangi Bogor yang mengambil kebijakan Pendidikan gratis bagi para peserta didik di dalamnya. Metode yang digunakan penelitian ini adalah dengan wawancara dan pengumpulan data, serta kajian kepustakaan berupa jurnal-jurnal penelitian, dokumen-dokumen, buku-buku literatur dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema pokok pembahasan. Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan gratis dalam sebuah lembaga pendidikan justru akan berdampak baik ketika diimbangi dengan tata kelola yang rapi dan profesional.

Kata kunci: kebijakan pendidikan, kualitas pendidikan, pendidikan gratis

Diserahkan: 28-11-2022 **Disetujui:** 31-12-2022 **Dipublikasikan:** 31-12-2022

Kutipan: Usman, D., Sauri, S., & Fath, A. (2022). Dampak kebijakan pendidikan gratis bagi kualitas pendidikan di Pesantren Fath. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(4), 589-600.

doi:<http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v11i4.8706>

I. Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia mempunyai beragam corak dan bentuk, mulai dari pendidikan yang bersifat negeri, swasta dan bahkan yang berbentuk pondok pesantren. Semua mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menjalankan undang-undang Pendidikan yang bertujuan mencerdaskan bangsa. Namun untuk mencapai tujuan tersebut banyak permasalahan pendidikan yang harus diselesaikan, baik itu dari segi kurikulumnya, tenaga pengajarnya, metode pengajarannya sampai persoalan pembiayaannya. Masing-masing lembaga mempunyai ciri khas tersendiri dalam mengatasi semua permasalahan. Namun ada satu masalah yang belum terselesaikan dalam dunia pendidikan di Indonesia ini yaitu masalah biaya pendidikan yang sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengaturnya pada undang-undang no.20 2003. Pasal 31 (2) dalam UUD 1945 hasil Amandemen menyebutkan bahwa: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya" pasal 34 (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa: "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya."

Menarik kita melakukan analisis tentang bagaimana sebuah pesantren yang bersifat swasta berani mengambil kebijakan Pendidikan gratis bagi peserta didik yang tidak mampu. Para pakar memang sudah lama melakukan analisis kebijakan ini. Penelaahan Sektor Pendidikan (PSP: 1986) melihat bahwa analisis kebijakan adalah cara untuk mendapatkan informasi teknis yang didukung oleh fakta-fakta yang benar secara empiris berdasarkan hasil analisis data. Gresto (2002) mengatakan bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggung jawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya. Sementara Anderson (2006) menjelaskan bahwa kebijakan adalah tindakan di desain secara sengaja, relatif stabil dilakukan oleh sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama. (Jusdin dan Rusdiyanto 2013).

Duncan MacRae (1976) memandang bahwa analisis kebijakan termasuk disiplin ilmu sosial terapan dengan metode ilmiah berdasarkan fakta-fakta untuk memecahkan masalah publik. Duncan mengatakan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan melalui pengumpulan data untuk menghasilkan informasi dalam rangka memecahkan masalah kebijakan (Suryadi & Tilaar 1994).

Dari pendapat para ahli kebijakan di atas, kita menemukan sebuah pemahaman bahwa perumusan dan implementasi kebijakan merupakan fungsi penting dari berjalannya sebuah pemerintahan. Maka dari itu kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat

penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. Termasuk kebijakan program Pendidikan gratis.

Ada beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama penelitian Lestari (2019) yang berjudul “Sistem Pengelolaan Keuangan Program Pendidikan Gratis Di Pesantren”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penganggaran dan pengalokasian dana pendidikan gratis di pesantren, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan pendidikan gratis di pesantren, dan penggunaan keuangan program pendidikan gratis di pesantren di Yayasan Al-Ikhlas Al-Faruq Bondowoso.

Berikutnya penelitian Yogi (2019) yang berjudul “Manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pesantren Kalimasada Jombang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, faktor pendukung dan penghambat manajemen keuangan, dan solusi dari hambatan manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pesantren Kalimasada Jombang.

Berikutnya penelitian Munib dkk. (2022) yang berjudul “Manajemen Keuangan Dalam Kebijakan Pendidikan Gratis”. Penelitian ini merupakan bertujuan untuk mendeskripsikan sistem manajemen keuangan pondok pesantren Darul iman untuk mendeskripsikan penerapan kebijakan pendidikan gratis dan untuk mendeskripsikan evaluasi yang dilakukan di Pondok pesantren Darul Iman.

Berikutnya penelitian Kalsum (2016) yang berjudul “Dampak Pendidikan Gratis Terhadap Kualitas Pengadaan Sarana Prasarana di Pondok Pesantren Hj. Haniah Madrasah Aliyah Kabupaten Maros.” Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui pelaksanaan program pendidikan gratis, mengetahui kualitas pengadaan sarana prasarana dan untuk mengetahui dampak pendidikan gratis terhadap kualitas pengadaan sarana prasarana di Pondok Pesantren Hj. Haniah Madrasah Aliyah Kabupaten Maros.

Herdianto dkk. (2022) yang berjudul “The Zakat Effect: Evaluasi Dampak Pengelolaan Zakat Pada Bidang Pendidikan Menggunakan Servqual Model”. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat faktor yang signifikan mempengaruhi kepuasan mustahik yaitu siswa SMA Terbuka Depok (sekolah yang merupakan hasil program pendidikan dari Lembaga Amil Zakat Sukses di Depok).

Muazzinah (2022) yang berjudul Aksesibilitas Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Miskin Pada Sekolah Swasta Islamic Boarding School Di Aceh. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin pada Dayah Terpadu RIAB (Ruhul Islam Anak Bangsa) Islamic Boarding School) Aceh Besar dan Dayah Modern Darul Ulum YPUI (Yayasan Pembangunan Umat Islam) Banda Aceh yang menerapkan sistem pendidikan terpadu.

Marzuki (2011) yang berjudul Kebijakan Program Sekolah Gratis (PSG) Dan Dampaknya Terhadap Akses Layanan Memperoleh Pendidikan Di Provinsi Sumatera Selatan kebijakan Program Sekolah Gratis (PSG). Sasaran PSG adalah semua sekolah dari SD/MI sampai ke jenjang SLTA baik negeri maupun swasta. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan retrospeksi yang berorientasi pada aplikasi kebijakan (*applications oriented analysis*) yang telah ada.

Penelitian ini merupakan hasil analisis terhadap kebijakan Pesantren Fath Sukawangi Bogor tentang kebijakan pendidikan gratis dan bagaimana pelaksanaannya untuk mengetahui dampak terhadap kualitas Pendidikan peserta didik. Beberapa pembahasan penting dalam penelitian ini, pertama mengapa harus ada kebijakan gratis pada kegiatan Pendidikan? Apa pengaruhnya terhadap kualitas Pendidikan? Bukankah dengan kebijakan gratis akan berdampak negatif terhadap mutu peserta didik?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali kebijakan pendidikan gratis di Pesantren Fath Darut Tafsir Sukawangi. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan wawancara terhadap pimpinan harian Pesantren Fath Darut Tafsir Sukawangi dan pengumpulan data, selain itu juga menggunakan kajian kepustakaan berupa jurnal-jurnal penelitian, dokumen-dokumen, buku-buku literatur dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema pokok pembahasan. Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Landasan pendidikan gratis

Kebijakan pendidikan gratis ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah secara maksimal berdasarkan UUD 45. Bahwa pemerintah wajib memberikan Pendidikan dengan tanpa memungut biaya seperti yang tertera dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berikut ini kutipan kedua asas legalitas tersebut. Pasal 31 (2) dalam UUD 1945 hasil Amandemen menyebutkan bahwa: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya" pasal 34 (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa: "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya."

Dalam konsep Pendidikan nasional dengan tegas dinyatakan, "pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.

Jusdin dan M. Rusdiyanto (2013) mengatakan berdasarkan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional merupakan Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat yang diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan dan peradaban sehingga manusia Indonesia akan bermartabat dalam kehidupannya dalam sebuah negara. Namun persoalan yang dihadapi bahwa sistem Pendidikan Indonesia meskipun dalam kondisi konstitusi sudah memiliki landasan yang kuat tetapi kenyataannya belum dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Ada beberapa alasan banyak orang yang tidak mendapatkan hak Pendidikan gratis tersebut. Boleh jadi karena terlalu besarnya jumlah peserta didik yang harus diberi gratis. Akibatnya dana operasional Pendidikan yang disediakan pemerintah tidak mencukupinya. Atau boleh jadi memang tidak ada minat belajar di Lembaga Pendidikan yang disediakan pemerintah, karena persepsi bahwa kebanyakan Lembaga yang dikelola secara gratis tidak berkualitas. Atau boleh jadi karena program Pendidikan yang diminati tidak ditemukan di Lembaga Pendidikan pemerintah, seperti Pendidikan agama secara intensif berbasis pesantren dan sebagainya.

Sebenarnya kita sangat senang dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai Pendidikan gratis tersebut. Sebab ini merupakan konsep yang sangat ideal, yang dengannya tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar. Dan memang tugas negara sebagaimana diamanahkan UUD45 adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Tetapi kenyataannya sering kali Pendidikan gratis tersebut hanya menjadi bahan janji kampanye. Lalu setelah mereka terpilih sebagai Anggota Legislatif (Aleg) dengan mudah melupakan semua janji tersebut. Sesungguhnya Amanah Undang-undang tersebut benar-benar dilaksanakan secara gratis niscaya kita tidak akan mendengar ada anak negeri yang terbelakang.

Apalagi pelaksanaannya benar-benar berkualitas tidak kalah dengan Lembaga Pendidikan berbayar. Maka dari sini kita akan menikmati program pendidikan yang menyeluruh “*education for all*”. Artinya tidak hanya orang-orang yang berduit yang menikmati Pendidikan melainkan juga semua level masyarakat termasuk yang tidak mampu akan merasakan nikmatnya program Pendidikan. Dengan demikian terasa betapa kemerdekaan yang telah diperjuangkan *founding fathers* benar-benar tercapai.

Sebenarnya keberanian beberapa Lembaga Pendidikan swasta untuk membuka kebijakan pendidikan gratis bukan karena mendapatkan suntikan dana dari pemerintah, melainkan karena kepedulian yang mereka miliki. Banyak Lembaga Pendidikan swasta yang membuka kebijakan Pendidikan gratis hanya dengan sangat terbatas, yaitu hanya bagi yang tidak mampu dan berprestasi. Tentu kebijakan ini belum membuka ruang bagi kebanyakan yang tidak mampu dan tidak berprestasi. Sebagian yang lain luas lagi, dengan

menerima siapa saja yang tidak mampu di level Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja. Sementara di level selanjutnya tidak ada kebijakan Pendidikan gratis.

B. Pendidikan gratis di Pesantren Fath

Kebijakan pendidikan yang bergerak secara sukarela dari lembaga-lembaga swasta sangat membantu program pemerintah di bidang pendidikan yaitu memperluas lapangan Pendidikan selebar-lebarnya. Seharusnya gerakan sukarela ini disambut hangat oleh pemerintah dan dimudahkan akses perizinannya, sekalipun di sana-sini masih banyak yang menemukan kendala. Padahal dengan Gerakan sukarela dari masyarakat di bidang pendidikan gratis tersebut kewajiban pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam menikmati Pendidikan telah terlaksana. Sebab bagaimanapun lembaga Pendidikan swasta tersebut telah mendapatkan dukungan dari masyarakat luas karena telah membuka solusi bagi anak-anak negeri yang tidak mampu.

Pendidikan gratis sebenarnya untuk mereka yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun secara sosial. Sebab hanya mereka yang berhak menerima pendidikan gratis tersebut dalam mengakses jalan hidupnya di berbagai hal termasuk mengakses pendidikan. Merekalah sebenarnya yang dimaksud dalam UUD45 sebagai amanah untuk dijaga kesejahteraan dan kecerdasannya. Memang pemerintah telah meluncurkan program Bantuan Sosial (Bansos) untuk Pendidikan Gratis dan sebagainya untuk mereka yang memang layak menerima. Dalam hal ini pemerintah telah menambah anggaran sebanyak 20 persen, maka kemungkinan untuk membantu warga yang tidak mampu akan sangat mungkin dilakukan.

Dalam hal ini bantuan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) yang telah dikucurkan oleh pemerintah kepada berbagai Lembaga Pendidikan swasta termasuk pesantren-pesantren adalah bukti bahwa pemerintah telah mendukung program Pendidikan gratis. Sekalipun dalam pelaksanaannya pengucuran dana BOS tersebut kadang kurang tepat sasaran. Sebab yang mendapatkannya banyak dari mereka yang mempunyai relasi dengan pejabat pemerintahan dan orang-orang yang tahu cara mengaksesnya. Sementara Lembaga Pendidikan lainnya yang sebenarnya lebih berhak karena masih sangat kurang sarana malah tidak mendapatkannya. Termasuk Pesantren Fath Sukawangi adalah lembaga swasta yang belum pernah mendapatkan kucuran dana BOS.

Implementasi pendidikan gratis tersebut memang harus dikaji ulang dari segi ketepatan sasaran dan efektivitas bagi peserta didik. Pimpinan harian menyatakan,

Pesantren Fath Darut Tafsir Sukawangi mempunyai kebijakan yang sangat realistis. Ukuran yang digunakan adalah kemampuan orang tuanya dalam membayar zakat. Bila orang tua peserta didik mampu membayar zakat maka anak-anak mereka belajar di pesantren dengan biaya dari orang tua mereka. Sebab mereka tidak boleh menggunakan harta zakat. Di saat yang sama zakat yang mereka bayarkan hendaklah disalurkan kepada pesantren untuk menanggung para peserta didik lainnya yang

tidak mampu. Dengan kebijakan seperti ini sampai sekarang program Pendidikan di pesantren Fath Sukawangi tetap berjalan lancar.

Pemerataan belum tentu tepat sasaran tanpa dibarengi dengan kesadaran untuk berbuat adil. Ketika sebagian pejabat mengutamakan orang-orang tertentu atau Lembaga tertentu karena kedekatan hubungan dan dekatnya relasi, tentu pemerataan dengan cara seperti ini adalah ketidakadilan. Sebagian orang sebenarnya mampu dan tidak layak digratiskan, tetapi kenyataannya ia mendapatkan pelayanan Pendidikan gratis. Sebagian yang lain seharusnya digratiskan tetapi karena satu dan lain hal akhirnya ia harus membayar. Dari sini muncul akibat berikutnya yaitu terpaksa harus berhenti sekolah di tengah jalan karena tidak mampu membayar biaya sekolah.

Untuk ini, setiap Lembaga Pendidikan yang menetapkan kebijakan untuk Pendidikan gratis harus benar-benar teliti dalam implementasinya, sebab bagaimanapun program Pendidikan gratis tersebut bukan hanya sekedar program melainkan harus juga harus efektif baik dari segi pemerataan maupun dari segi *output* peserta didik. Jangan sampai karena gratis lalu muncul sikap tidak bertanggung jawab karena cara pandangya *nothing to loose*. Tentu cara pandang seperti ini akan merusak efektivitas pendidikan gratis di mana seharusnya membantu bagi yang tidak mampu sebagai jalan keluar malah berakibat sebaliknya.

Suyahman (2016) menyebutkan ada tiga pilihan bagi Lembaga Pendidikan gratis: pertama, pendidikan gratis untuk semua, dengan kelemahan tidak membedakan mana yang mampu dan mana yang tidak mampu. Padahal hakikat Pendidikan gratis untuk mereka yang tidak mampu. Kedua, pendidikan gratis *by name and by address*, yaitu hanya bagi mereka yang layak mendapatkan gratis karena tidak mampu atau miskin. Dalam hal ini Lembaga harus mempunyai data yang akurat untuk menyeleksi peserta didik yang benar-benar layak dibantu. Ketiga, pola subsidi silang, yaitu pendidikan gratis bagi yang tidak mampu sementara yang mampu tetap membayar sesuai dengan ketentuan. Pola yang ketiga inilah yang diambil oleh Pesantren Fath dalam menerapkan Pendidikan gratisnya.

Pendidikan gratis memang merupakan sebuah kebijakan yang didorong oleh kepedulian terhadap mereka yang tidak berdaya. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak orang-orang di sekitar kita yang dicekam kemiskinan dan kebodohan. Mereka tidak bisa mendapatkan jalan hanya melalui santunan untuk kebutuhan pokok melainkan juga harus melalui Pendidikan gratis sebagai usaha untuk memperbaiki kualitas hidup keluarganya.

Terkait hal ini, pimpinan harian Pesantren Fath menyatakan,

Pesantren Fath bergerak untuk peduli kepada mereka yang lemah. Dan hal ini tentu sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan donasinya baik berupa infak, sedekah maupun zakat. Sebab para peserta didik tidak saja mereka yang

berhak menerima zakat tetapi juga mereka sedang di jalan Allah yang harus mendapatkan kepedulian dari semua pihak.

C. Dampak pendidikan gratis pada kualitas pendidikan

Menurut pimpinan harian, kebijakan pendidikan gratis yang diambil pesantren Fath, memberikan dampak yang positif di antaranya: (a) Memudahkan para peserta didik yang tidak mampu untuk juga bisa menikmati Pendidikan sebagaimana layaknya orang-orang mampu. (b) Meningkatkan kualitas manusia Indonesia karena generasi mudanya telah mendapatkan Pendidikan yang layak. (c) Mereduksi tingkat pengangguran karena dengan Pendidikan tersebut generasi muda bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan terentaskan dari kemiskinan. (d) Menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas baik secara *skill* maupun wawasan ilmiah. (d) Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tetapi selain dampak positif, pimpinan pesantren menambahkan dampak negatif yang biasa terjadi di antaranya: (a) Kurang bersungguh-sungguh belajar karena merasa tidak ada beban "*no thing to loose*". (b) Kurang dewasanya peserta didik karena tidak merasakan perjuangan hidup. Hal ini bisa menimbulkan sebagian Peserta didik berlaku seenaknya dalam hal belajar ataupun pembiayaan. (c) Terbatasnya tenaga yang berkualitas karena menuntut biaya mahal, sementara biaya operasional sudah habis untuk memenuhi kebutuhan pokok peserta didik.

Menurut pimpinan harian, Pesantren Fath melakukan berantisipasi sebagai berikut: (a) Membuat perjanjian yang ditandatangani oleh peserta didik di antara poinnya adalah akan bersungguh-sungguh belajar sampai selesai dan menjaga kualitas nilai yang harus dicapai. Jika tidak, maka ia harus siap mengganti semua pembiayaan yang telah digunakan. (b) Mengondisikan peserta didik di dalam wilayah pesantren sebagaimana biasanya sebuah pondok pesantren lainnya, sehingga adanya peserta didik dalam satu wilayah pondok tentu akan mudah untuk mengontrol akhlak dan kesungguhan belajarnya. (c) Menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas dan *stand by* mendampingi peserta didik selama dua puluh empat jam. (d) Melakukan evaluasi intensif mengenai perkembangan peserta didik. Dengan Langkah-langkah yang dilakukan Pesantren Fath dalam mengimplantasikan kebijakan Pendidikan gratis maka semua pandangan pro-kontra tentang Pendidikan gratis, akan terjawab. Bahwa tidak selamanya Pendidikan gratis kualitasnya rendah, tetapi juga Pendidikan gratis yang berkualitas baik seperti di Pesantren Fath.

Jadi kebijakan pendidikan gratis perlu selektif supaya menjadi efektif. Caranya harus dipastikan siapa saja yang boleh mendapatkan Pendidikan gratis tersebut? Karena ternyata di lapangan kita menemukan bahwa banyak sekali anak para pejabat dan orang-orang kaya justru sangat menikmati Pendidikan gratis tersebut. Dalam kondisi yang demikian, sangat perlu meneliti ulang kebijakan pendidikan gratis agar distribusinya

tepat sasaran dan efektif. Di saat yang sama tidak adanya perjanjian antara Lembaga dan peserta didik untuk komitmen belajar sehingga peserta didik bertindak semena-mena dalam belajar. Lebih dari itu tidak adanya sanksi bagi yang tidak mencapai target belajar, akibatnya peserta didik mengabaikan aturan belajar yang seharusnya mereka ikuti. Berdasarkan penelitian ini ke depannya kebijakan pendidikan gratis harus dengan peraturan yang ketat, sehingga tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan mereka- mereka yang tidak bertanggung jawab.

D. Kendala pendidikan gratis

Memang banyak penyebab rendahnya mutu pendidikan di Lembaga yang mengambil kebijakan Pendidikan gratis: 1) Rata-rata ketuntasan belajar masih rendah, karena tidak mencapai target yang ditentukan 2) Banyak sarana penunjang yang belum tersedia seperti perpustakaan yang memadai dan lain sebagainya. 3) banyak para guru yang kurang kreatif dan inovatif dalam mengajar, sehingga kemajuan teknologi yang tersedia tidak dimanfaatkan. 4). Banyak siswa yang lemah minat membaca buku, sehingga waktu mereka habis hanya untuk bermain dan menonton hiburan yang sia-sia. 5). Semrawutnya manajemen sarana pendidikan sehingga tata kelola sarana pembelajaran masih belum baik. 7). Tingkat motivasi kerja guru masih rendah sehingga mereka tidak bekerja secara optimal.

Ini semua tidak terjadi di pesantren Fath karena beberapa indikator sebagai berikut: a). Sistem pembelajaran yang terkontrol, baik secara pelaksanaan maupun pencapaian target. Maka hampir bisa dikatakan tidak ada penyimpangan dari perencanaan pembelajaran yang telah digariskan. b). Sarana penunjang di pesantren Fath sangat diperhatikan, terutama yang terkait dengan sarana belajar dan mengajar di ruang kelas. Termasuk alat LCD selalu disediakan sesuai dengan keperluan. c). Para guru di pesantren Fath adalah para sarjana yang berpengalaman. Minimal mereka adalah tamatan Pesantren sehingga mereka tahu bagaimana mengajar para santri sebagai peserta didik. Di saat yang sama mereka telah terlatih bagaimana menggunakan kemajuan teknologi dengan sebaik-baiknya. d). Di pesantren Fath peserta didik tidak boleh pegang ponsel kecuali hanya pada hari libur, itu pun sangat dibatasi waktunya. Maka waktu mereka banyak digunakan dalam membaca buku terutama buku pelajaran selain itu mereka gunakan untuk menghafal Al-Quran, sebab mereka ditargetkan harus menyelesaikan hafalan sampai tiga puluh juz. e). Manajemen tata kelola di pesantren Fath cukup rapi, karena setiap hari dikontrol langsung oleh Pimpinan pesantren. f). Semua guru di pesantren Fath rata- rata mempunyai dedikasi yang tinggi sebab mereka adalah orang-orang yang telah terbina secara sistematis di pesantren baik mereka yang merupakan tamatan pesantren Fath sebagai guru pengabdian maupun mereka yang tamatan pesantren lain sebagai guru bantu. Di saat yang sama pesantren Fath menyediakan semua kebutuhan mereka sehingga tidak sibuk dengan urusan lain selain mengajar.

Secara umum mutu pendidikan, memang banyak terkait dengan sumber daya dan parameter sistem yang ditetapkan dan dicita-citakan. Artinya, yang paling berpengaruh terhadap mutu dan kualitas pendidikan adalah personal perancang dan pengambil keputusan, termasuk keinginan politis penguasa (pemerintah)(Kartasasmita, 1993). Untuk itu, perlu ditetapkan standar mutu pendidikan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, masalah mutu pendidikan berhubungan dengan tren masyarakat dan kebutuhan pasar sebagai pengguna keluaran. Ada tiga faktor penting yang harus dipertimbangkan secara makro dalam melakukan penyusunan strategi sistem pendidikan, yaitu: (1) ketersediaan perangkat dan sumber daya, (2) kecenderungan masyarakat secara umum, dan (3) kualifikasi *output* dari sistem itu sendiri.

Pesantren Fath sejak dini telah mempelajari apa yang menjadi kecenderungan masyarakat. Terutama dalam pembinaan iman dan takwa sebagai tujuan pendidikan nasional. Karena itu pesantren telah menjadikan tahfiz Al-Quran sebagai *branding*-nya. Di saat yang sama akhlak mulia sebagai tolok ukurnya. Bagi pesantren Fath keahlian memang sangat penting, tetapi di atas itu semua akhlak adalah nomor satu. Karenanya pembinaan akhlak untuk para peserta didik langsung dilakukan oleh para Kiai, sekalipun dalam kesehariannya dibantu oleh para Wakil Kiai (WK). Bila di lembaga pendidikan lainnya kita menemukan banyak keluhan tentang rendahnya kualitas pembelajaran dan *output* peserta didik, di pesantren Fath malah menemukan kualitas yang mumpuni.

Ada sejumlah faktor dan dimensi sosiologis yang harus juga dijadikan dasar pijakan, untuk menjamin kualitas mutu pendidikan: yaitu: (1) tersedianya unit analisis sistem, (2) Terkonsepnya perencanaan yang layak dan tersusun secara sistematis, (3) tersedianya sumber daya yang siap kerja secara profesional, (4) tersedianya dana yang memadai sebagai bahan bakar operasional, (5) adanya dukungan masyarakat, sehingga lembaga pendidikan menjadi semakin bermanfaat (6) tidak adanya kontradiksi dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan (7) faktor- faktor non teknis, seperti: stratifikasi masyarakat, kebutuhan pasar, dan stabilitasi pasar (pengguna *output*). Perlu diketahui bahwa kelayakan masing-masing faktor baik secara makro maupun mikro sangat menentukan arah dan kelayakan analisis sistem yang dirumuskan atau direkomendasikan (Devidson1989).

Penting untuk digarisbawahi bahwa secara konseptual sistem pengelolaan pendidikan nasional Indonesia sebenarnya sudah menggunakan pendekatan terpadu, namun secara operasional tidak sejalan dengan konsep awal yang telah disepakati. Karena itu banyak lembaga pendidikan swasta yang mengambil arah baru untuk membuat acuan pendidikan yang ideal. Sebagian dari mereka ada yang memasang tarif mahal, tentu sesuai dengan fasilitas yang disediakan. Sebagian yang lain ada yang mengambil jalan tengah, yakni memasang tarif tidak mahal. Dan sebagian yang lain ada menggunakan sistem subsidi silang, memasang tarif bagi yang mampu dan gratis bagi

yang tidak mampu. Pesantren Fath mengambil jalan yang realistis sebab kenyataannya banyak orang tua yang mampu untuk membiayai anaknya belajar di saat yang sama banyak juga yang tidak mampu. Maka dengan jalan membuka peluang pendidikan gratis bagi mereka yang tidak mampu, ini sudah menjadi solusi bagi peserta didik yang tidak berdaya untuk juga menikmati pendidikan yang layak sebagaimana mestinya

Selain faktor personal yang paling menentukan adalah kurikulum yang memuat sejumlah rumusan dan acuan pembelajaran (Lasmawan, 2000), namun sayang banyak lembaga pendidikan yang tidak mampu menerjemahkan makna dan jiwa dari kurikulum itu dengan baik. Akhirnya, muncullah apa yang disebut “disorientasi” dalam sistem pendidikan. Karena itu diperlukan sikap transparan dari kalangan pengambil kebijakan baik di tingkat lapangan maupun pusat pemerintahan. Salah satu caranya adalah membuat sistem desentralisasi (otonomi) pengelolaan pendidikan. Jika cara ini diterima, maka kondisi yang selama ini tampak kusut akan menjadi terurai. Sebab masing-masing lembaga akan berinovasi untuk menempuh jalannya sendiri secara independen di bawah payung pemerintah pusat. Sekalipun secara pendanaan tidak mendapatkan bantuan namun secara legalitas mereka mendapatkan dukungan sehingga kepercayaan masyarakat muncul. Ini juga solusi terbaik untuk membantu lembaga-lembaga yang peduli terhadap para peserta didik yang tidak mampu dengan mengambil kebijakan pendidikan gratis seperti yang dilakukan oleh pesantren Fath di atas.

IV. Kesimpulan

Dari analisis di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut: (1) Kebijakan pendidikan gratis seperti yang dilakukan pesantren Fath adalah sangat strategis untuk menyelamatkan anak-anak muda yang tidak mampu sehingga mereka bisa menikmati pendidikan sebagaimana mereka yang mampu. (2) Pemerintah seharusnya memberikan dukungan minimal moral dan legal formal terhadap lembaga pendidikan yang mengambil kebijakan pendidikan gratis, karena langkah yang mereka tempuh telah meringankan tugas pemerintah sesuai dengan amanah UUD45. (3) Langkah-langkah operasional yang ditempuh lembaga swasta yang melaksanakan kebijakan pendidikan gratis seperti pesantren Fath seharusnya ditiru untuk melahirkan *output* peserta didik yang berkualitas terutama di lembaga-lembaga pendidikan gratis di bawah pemerintah. (4) Kebijakan pendidikan gratis yang dilakukan pemerintah harus dibuat formulasi baru dengan mengacu kepada asas keadilan sehingga tercapai pemerataan secara proporsional

Daftar Pustaka

- Anderson, J. E. (2006). *Public Policy Making*. Holt Rinehart & Winston.
Herdianto, D., Safitri, N., Rohman, M. A., Rifqi, M. A., & Nisa, K. (2022). The Zakat Effect: Evaluasi Dampak Pengelolaan Zakat Pada Bidang Pendidikan Menggunakan

- Servqual Model. *Asyafina Journal: Jurnal Akademi Pesantren*, 1(1), Art. 1.
- Kalsum, U. (2016). *Dampak Pendidikan Gratis Terhadap Kualitas Pengadaan Sarana Prasarana di Pondok Pesantren Hj. Haniah Madrasah Aliyah Kabupaten Maros* [Diploma, UIN Alauddin Makassar].
- Kartasasmita, G. (1993). *Perencanaan pembangunan nasional*. Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ilmu Administrasi.
- Lestari, M. I. (2019). Sistem Pengelolaan Keuangan Program Pendidikan Gratis Di Pesantren. *JMSP (Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan)*, 3(3), Art. 3.
- MacRae, D. (1976). *Technical communities and political choice*. Minerva.
- Marzuki, E. (2011). Kebijakan Program Sekolah Gratis (PSG) Dan Dampaknya Terhadap Akses Layanan Memperoleh Pendidikan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan*, 5(3), Art. 3.
- Muazzinah, M. (2022). Aksesibilitas Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Miskin Pada Sekolah Swasta Islamic Boarding School di Aceh. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 7(2), Art. 2.
- Munib, M., Farida, S., Rohim, R., Badruttamam, B., & Faddol, M. (2022). Manajemen Keuangan Dalam Kebijakan Pendidikan Gratis. *Iqtisodina : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5(2), Art. 2.
- Rahadian, A. H. (2012). *Materi Kuliah Kebijakan Publik (Modul Kuliah)*. Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi STIAMI.
- Suryadi, A., & Tilaar, H. A. R. (1994). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. PT. Rosdakarya.
- Suyahman, S. (2016). Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis Di Sekolah Menengah Atas Dalam Kaitannya Dengan Kualitas Pendidikan Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 1047-1054.
- Yogi, Y. F. (2019). *Manajemen keuangan dalam kebijakan pendidikan gratis di Pondok Pesantren Kalimasada Jombang* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya].